



Edukasi Literasi Keuangan Publik bagi Masyarakat dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Daerah

Dewi ernita¹, Adek Irma Rosi, Tiara Lilia Surya³

¹Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

²Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

²Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

email: dewi.ernita14@gmail.com

Abstract

Transparent and accountable regional financial management requires the active participation of the community in the budget supervision process. However, low public financial literacy is one of the main obstacles in encouraging community involvement. This service activity aims to increase public understanding and capacity in supervising the use of the regional budget through public financial literacy education. The methods used are a participatory approach through socialization, group discussions (FGD), simulation analysis of APBD documents, as well as pre-test and post-test evaluations. The results of the activity showed an increase in public understanding of the structure of the APBD, sources of revenue, classification of expenditures, and participatory supervision mechanisms. In addition to improving cognitive aspects, this activity also encourages changes in attitudes and readiness of the community to be involved in budget planning and supervision forums. This activity contributes to strengthening social supervision and supporting the realization of transparent, accountable, and participatory regional financial governance.

Keywords: *public financial literacy, budget supervision, community participation, APBD, good governance*

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Namun, rendahnya literasi keuangan publik menjadi salah satu kendala utama dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah melalui edukasi literasi keuangan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi kelompok (FGD), simulasi analisis dokumen APBD, serta evaluasi pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap struktur APBD, sumber pendapatan, klasifikasi belanja, serta mekanisme pengawasan partisipatif. Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap dan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam forum perencanaan dan pengawasan anggaran. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat pengawasan sosial dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata kunci: *literasi keuangan publik, pengawasan anggaran, partisipasi masyarakat, APBD, good governance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel. Sebagai wakil rakyat dan pelaksana pelayanan publik di tingkat lokal, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber lain yang sah. Namun, kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan publik masih rendah. Minimnya pemahaman tentang mekanisme anggaran daerah menyebabkan masyarakat kurang berperan aktif dalam memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan publik masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami informasi anggaran, melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan APBD, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran. Edukasi literasi keuangan publik menjadi penting untuk memberdayakan masyarakat agar peran serta mereka dalam pengawasan keuangan daerah lebih optimal dan berbasis pengetahuan. Kegiatan edukasi literasi keuangan publik ini dirancang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk: Memberikan pemahaman dasar tentang struktur APBD, sumber penerimaan dan alokasi belanja daerah. Mengajarkan cara membaca dokumen anggaran publik, seperti RKA, APBD, dan Laporan Pertanggung jawaban. Membekali peserta dengan keterampilan dasar dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan indikator kinerja anggaran. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam forum publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta mekanisme pengawasan lainnya.. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan mengawasi penggunaan anggaran daerah

Literasi keuangan publik adalah kemampuan individu atau kelompok dalam memahami konsep dasar keuangan negara termasuk anggaran, pendapatan, belanja, dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran dalam konteks pemerintahan. Literasi ini bukan sekedar pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan informasi anggaran dalam pengambilan keputusan dan pengawasan publik (Halim, 2017).

Pengawasan anggaran daerah merujuk pada peran masyarakat dalam memantau, menilai, dan mengkritisi pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD. Pengawasan publik ini dapat dilakukan melalui mekanisme resmi seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), forum musyawarah, serta melalui media sosial sebagai ruang diskusi dan pelaporan (Susilo & Nugroho, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan daerah dipandang sebagai salah satu pilar good governance. Partisipasi ini mencakup kemampuan untuk memahami dokumen publik, akses informasi yang terbuka, serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan anggaran (World Bank, 2020).

Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi anggaran pada masyarakat, semakin efektif mereka dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Literasi keuangan menjadi dasar partisipasi aktif masyarakat dalam menilai alokasi belanja, mendorong transparansi, serta mencegah penyalahgunaan anggaran (Putri, 2021).

Masyarakat yang mengikuti edukasi literasi keuangan publik menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap struktur dan mekanisme anggaran daerah. Edukasi literasi keuangan publik meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menafsirkan dokumen anggaran publik.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan anggaran daerah (seperti Musrenbang, forum diskusi publik) meningkat setelah diberi edukasi literasi.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses pembelajaran, diskusi, dan simulasi pengawasan anggaran. Metode ini dipilih untuk mendorong peningkatan pemahaman sekaligus membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.

Aspek Edukasi Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar keuangan daerah, struktur APBD, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran. Aspek Partisipasi Publik Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah melalui forum-forum resmi seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik.

Aspek Pengawasan Sosial

Pembekalan keterampilan dasar dalam membaca dokumen anggaran serta mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisa-

si anggaran. Wilayah dan Sasaran Kegiatan dilaksanakan pada masyarakat desa/kelurahan tertentu dengan sasaran tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa, dan perwakilan kelompok masyarakat. Kegiatan ini tidak mencakup audit keuangan formal, tetapi terbatas pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Tahap Persiapan Melakukan observasi awal dan identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman anggaran daerah Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan atau tokoh masyarakat setempat. Penyusunan modul dan bahan ajar literasi keuangan publik (materi APBD, transparansi, mekanisme pengawasan).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode berikut: Sosialisasi dan

Ceramah Interaktif Penyampaian materi mengenai: Konsep dasar keuangan daerah Struktur dan komponen APBD Sumber pendapatan dan jenis belanja daerah Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk: Mengidentifikasi masalah pengelolaan anggaran di daerahnya Mendiskusikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai cara: Mengakses informasi anggaran public Menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang Menggunakan kanal pengaduan resmi

Keberhasilan kegiatan diukur melalui: Peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap struktur dan mekanisme APBD. Bertambahnya partisipasi masyarakat dalam forum pengawasan anggaran. Adanya komitmen bersama untuk membentuk kelompok pengawasan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi literasi keuangan publik dilaksanakan melalui tiga metode utama, yaitu sosialisasi materi, diskusi kelompok (FGD), dan simulasi membaca dokumen anggaran daerah. Peserta kegiatan terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, dan perwakilan kelompok masyarakat. Materi yang diberikan mencakup:

1. Struktur dan komponen APBD Sumber pendapatan daerah
2. Jenis dan klasifikasi belanja daerah
3. Mekanisme pengawasan partisipatif Peran masyarakat dalam Musrenbang



Kegiatan berlangsung dengan

partisipasi aktif peserta yang terlihat dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, serta keterlibatan dalam sesi diskusi. Dari hasil diskusi kelompok, terjadi perubahan pola pikir peserta, yaitu: Meningkatnya kesadaran bahwa pengawasan anggaran bukan hanya tugas DPRD atau inspektorat, tetapi juga masyarakat. Peserta menyatakan kesiapan untuk lebih aktif dalam forum Musrenbang dan kegiatan konsultasi publik. Beberapa peserta mengusulkan pembentukan kelompok diskusi masyarakat terkait anggaran desa/daerah

Secara konseptual, literasi keuangan publik merupakan bagian dari literasi fiskal (fiscal literacy) yang merujuk pada kemampuan individu memahami kebijakan fiskal, penganggaran, serta implikasinya terhadap pembangunan. Dalam perspektif teori good governance, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi publik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menginterpretasikan informasi tersebut. Tanpa literasi yang memadai, keterbukaan informasi tidak akan menghasilkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi publik yang menyatakan bahwa kualitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan analitis dalam mengevaluasi kebijakan publik serta keberanian untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Dengan demikian, literasi keuangan publik berfungsi sebagai variabel penguat (enabling factor) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sosial terhadap anggaran daerah.

Dari perspektif social accountability, kegiatan edukasi ini berkontribusi dalam membangun mekanisme kontrol horizontal antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pengawasan tidak lagi bersifat top-down melalui lembaga formal semata, tetapi juga

bottom-up melalui partisipasi warga. Model ini memperkuat akuntabilitas publik karena pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan.

Metode partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini, seperti diskusi kelompok dan simulasi analisis dokumen anggaran, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman aplikatif peserta. Pendekatan ini selaras dengan teori experiential learning yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman sebagai cara efektif untuk mentransformasikan pengetahuan menjadi keterampilan praktis. Peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempraktikkan cara membaca dan menganalisis dokumen anggaran secara langsung.



Namun demikian, pembahasan juga mengidentifikasi tantangan struktural yang perlu diperhatikan. Kompleksitas bahasa anggaran dan minimnya penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami menjadi hambatan utama dalam memperluas partisipasi publik. Selain itu, keberlanjutan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang dialog yang inklusif dan responsif.

Implikasi kebijakan dari hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan publik perlu diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi transparansi

anggaran, seperti penyajian APBD dalam bentuk infografis, dashboard digital, maupun forum konsultasi publik berbasis teknologi informasi. Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen pemberdayaan melalui program pengabdian yang berkelanjutan.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini memperkuat model hubungan antara literasi keuangan publik dan efektivitas pengawasan anggaran daerah. Literasi bertindak sebagai variabel intervening yang meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, edukasi literasi keuangan publik tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Edukasi Literasi Keuangan Publik bagi Masyarakat dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Daerah*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi literasi keuangan publik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil evaluasi pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.
2. Edukasi yang diberikan tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga membangun kesadaran (afektif) dan mendorong kesiapan berpartisipasi (behavioral) dalam proses pengawasan anggaran daerah. Peserta menunjukkan perubahan pola pikir bahwa

pengawasan anggaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

3. Melalui metode partisipatif seperti diskusi kelompok dan simulasi membaca dokumen anggaran, masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam memahami istilah teknis dan komponen anggaran yang sebelumnya dianggap kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan praktis lebih efektif dibandingkan metode ceramah semata.
4. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan komitmen masyarakat untuk lebih aktif dalam forum perencanaan dan pengawasan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, maupun mekanisme penyampaian aspirasi lainnya.
5. Penguatan literasi keuangan publik berkontribusi terhadap terciptanya pengawasan sosial (social control) yang lebih efektif. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, potensi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan anggaran dapat diminimalkan melalui partisipasi aktif dan kontrol publik.
6. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akses informasi anggaran yang sederhana dan mudah dipahami, serta perbedaan latar belakang pendidikan peserta yang memengaruhi tingkat pemahaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pendampingan lanjutan dan penyederhanaan informasi anggaran.
7. Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

Dengan demikian, edukasi literasi keuangan publik dapat menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif

dalam memperkuat sistem pengawasan anggaran daerah serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa/Kelurahan beserta perangkatnya yang telah memberikan izin, memfasilitasi tempat, dan membantu koordinasi selama kegiatan berlangsung. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti rangkaian edukasi literasi keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Ackerman, J. (2004). Co-governance for accountability: Beyond “exit” and “voice”. *World Development*, 32(3), 447–463.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.06.015>
- 2) Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- 3) Halim, A. (2017). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 4) Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- 5) Heald, D. (2006). Transparency as an instrumental value. *Public Administration*, 84(1), 25–43. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00591.x>
- 6) Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- 7) Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- 8) OECD. (2017). *Budget transparency toolkit: Practical steps for supporting openness, integrity and accountability in public financial management*. Paris: OECD Publishing.
- 9) Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- 10) Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 11) Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 12) Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 13) Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 14) Roberts, A. (2006). *Blacked out: Government secrecy in the information age*. Cambridge University Press.
- 15) Shah, A. (2007). *Participatory budgeting*. Washington, DC: World Bank.
- 16) Susilo, D., & Nugroho, R. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah dan implikasinya terhadap transparansi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 120–132.
- 17) World Bank. (2020). *Enhancing government transparency and citizen engagement in public financial management*. Washington, DC: World Bank.